

## Strategi Penguatan KELEMBAGAAN KOMUNITAS KREATIF TELEMATIKA

Potensi pertumbuhan industri elektronika dan telematika di Jawa Timur masih sangat tinggi dan diperkirakan akan terus berkembang dalam jangka waktu lama. Kebutuhan masyarakat akan industri telematika dan turunannya semakin meningkat sejalan dengan perkembangan investasi, teknologi dan manajemen. Hal ini ditunjang pula dengan populasi penduduk Jawa Timur yang semakin banyak, sehingga membentuk pasar yang potensial bagi produk elektronika maupun telematika. Kondisi perkembangan industri yang demikian dan guna mendukung *Grand Strategy* Jawa Timur menuju pada terwujudnya sebuah kawasan sebagai: “pusat pengembangan industri kreatif elektronika dan telematika terkemuka, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Jawa Timur yang semakin makmur” diperlukan strategi penguatan kelembagaan berupa unit pelaksana teknis yang khusus fokus pada pengembangan komunitas kreatif dalam wadah Jawa Timur Information Technology reative (JITC).

Studi Kelayakan mengenai pendirian UPT Teknologi Informasi ditinjau dari aspek ekonomi (*Opportunity Income*) menunjukkan lebih menguntungkan menginvestasikan usaha sebagai strategi penguatan kelembagaan dengan merintis penfirian Unit Pelaksana Teknis (UPT). Net B/C yang diperoleh menunjukkan bahwa selama empat tahun pengembangan JITC dengan terbentuknya UPT Teknologi Informasi maka setiap pengeluaran dapat menghasilkan pendapatan yang relatif lebih besar. Payback periode yang diperoleh menunjukkan bahwa pengembangsn JITC memiliki waktu pengembalian modal selama 3 tahun 6 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan JITC layak dilakukan dengan rintisan pendirian kelembagaan UPT karena pengembalian biaya modal atau investasi kurang dari umur kegiatan. Berdasarkan keempat kriteria kelayakan finansial, dapat disimpulkan bahwa strategi penguatan kelembagaan UPT berbasis komunitas kreatif dalam wadah JITC layak untuk dilakukan. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, maka alternatif strategi yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan UPT Teknologi Informasi berbasis komunitas JITC sebagai penyangga (buffer)nya pada masa yang akan datang adalah strategi progresif.

**litrus.** Penerbit



literasinusantaraofficial@gmail.com  
www.penerbitlitrus.co.id  
@litruspenerbit  
literasinusantara\_  
085755971589

Sosial Humaniora +17



Dr. Fajar Supanto, M.Si., dkk.

Strategi Penguatan KELEMBAGAAN KOMUNITAS KREATIF TELEMATIKA

litrus.



litrus.

## Strategi Penguatan KELEMBAGAAN KOMUNITAS KREATIF TELEMATIKA

Dr. Fajar Supanto, M.Si.  
Dr. Dodot Saptoadi, M.Si.  
Dr. Saudah, S.Sos., M.Si.  
Dr. Yuntawati Fristin, S.Sos., MAB.



Dr. Fajar Supanto, M.Si.  
Dr. Dodot Saptoadi, M.Si.  
Dr. Saudah, S.Sos., M.Si.  
Dr. Yuntawati Fristin, S.Sos., MAB.

*Strategi Penguatan*

**KELEMBAGAAN  
KOMUNITAS  
KREATIF  
TELEMATIKA**

 Penerbit  
**litrus.**

---

**STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS  
KREATIF TELEMATIKA**

---

Ditulis oleh:

**Dr. Fajar Supanto, M.Si.**

**Dr. Dodot Saptoadi, M.Si.**

**Dr. Saudah, S.Sos., M.Si.**

**Dr. Yuntawati Fristin, S.Sos., MAB.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT. Literasi Nusantara Abadi Grup**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip  
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku  
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Maret 2023

Perancang sampul: Syafri Imanda

Penata letak: Syafri Imanda

**ISBN : 978-623-8227-38-9**

xiv + 206 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Maret 2023



## PRAKATA

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya Buku Monograf dengan judul “Strategi Penguatan Kelembagaan Komunitas Kreatif Telematika”. Substansi isi Buku Monograf ini antar lain profil potensi dan kendala Industri Kreatif Berbasis Komunitas Dalam Wadah Jawa Timur Information Technology Creative (JITC) sebagai embrio dirintisnya pendirian fasilitas kelembagaan komunitas kreatif telematika dengan nomenklatur UPT Teknologi Informasi, studi kelayakan dirintisnya pendirian UPT Teknologi Informasi Berbasis Komunitas dalam Wadah JITC sebagai penyangga (buffer)nya, model pengembangan UPT Teknologi Informasi berbasis komunitas dalam wadah JITC sebagai penyangga (buffer)nya dan rekomendasi strategi penguatan fasilitas kelembagaan UPT Teknologi Informasi berbasis komunitas dalam wadah JITC sebagai penyangga (buffer)nya pada masa yang akan datang.

Buku ini sebagai salah satu hasil kajian penting yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan para pemangku kepentingan lainnya terkait strategi penguatan kelembagaan berbasis komunitas kreatif dalam wadah Jawa Timur Information Technology Creative (JITC) yang berada di Kota Malang yang disusun dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang tersedia dan dapat diakses.

Kami mengucapkan terimakasih atas segala saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak yang bersedia memperkaya informasi dan pengetahuan sehingga Buku Monograf ini dapat disajikan dengan lebih komprehensif.

Penyusun



## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

### BABI

Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	7
C. Dasar Hukum .....	7

### BAB II

Tinjauan Pustaka .....	9
A. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika.....	9
B. Memahami UPT .....	15
C. Teori Investasi .....	18
D. Pentingnya Investasi dalam Pembangunan Wilayah .....	20

E. Jenis Investasi .....	21
F. Karakteristik Investasi.....	22
G. Manajemen Resiko Investasi .....	23
H. Pola Pembinaan Komunitas dengan Model <i>Quadruple Helix</i> .....	24

## **BAB III**

<b>Metodologi Kegiatan.....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan .....	33
B. Kerangka Alur Pikir .....	35
C. Metodologi .....	36
D. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	48

## **BAB IV**

<b>Gambaran Umum JITC .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Jawa Timur Information Technology Creative (JITC) .....	49
B. Informasi Aktivitas Relawan dari Tahun Ke Tahun.....	50
C. Deskripsi Aktifitas JITC .....	87
D. Kondisi Keuangan Industri .....	87
E. Peluang Industri dan Inovasi .....	89
F. Pengembangan Industri .....	94

## **BAB V**

<b>Studi Kelayakan Dirintisnya Pendirian UPT Teknologi Informasi Berbasis Komunitas Dalam Wadah JITC Sebagai Penyangga (Buffer)Nya .....</b>	<b>105</b>
A. Analisis SWOT .....	105
B. Model Penguatan Industri Telematika.....	131

C. JITC Malang Dalam Implementasi Model Penguatan Industri Kreatif .....	139
D. Penyiapan Operasional UPT TI .....	143
E. Rancangan Strategis UPT TI Dalam Penguatan Basis Komunitas Industri .....	146
F. Landasan Operasional UPT TI.....	152
G. Aspek Dukungan Kelembagaan .....	154
H. Aspek Organisasional dan Manajerial .....	155
I. Aspek Sosial dan Pemasaran.....	157
J. Aspek Finansial.....	159
K. Analisis Perkembangan Komunitas .....	162
L. Perkembangan Investasi .....	177
M. Perkembangan Inovasi Teknologi .....	186

## **BAB VI**

<b>Penutup .....</b>	<b>195</b>
----------------------	------------

A. Kesimpulan.....	195
B. Saran.....	197

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>199</b>
----------------------------	------------

<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>201</b>
------------------------------	------------





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.	Kelebihan dan Kekurangan NPV .....	45
Tabel 2.	Kelebihan dan Kekurangan IRR .....	47
Tabel 4.	Relawan Bidang Videografi dan Film Tahun 2013.....	51
Tabel 5.	Relawan Bidang Fotografi Tahun 2013 .....	52
Tabel 6.	Relawan Bidang Web Design and Development Tahun 2013.....	52
Tabel 7.	Relawan Bidang Animasi Tahun 2013 .....	53
Tabel 8.	Relawan Bidang Digital Audio Tahun 2013 .....	54
Tabel 9.	Relawan Bidang Game Interaktif Tahun 2013.....	54
Tabel 10.	Data Industri Tahun 2013.....	55
Tabel 11.	Relawan Bidang Videografi dan Film Tahun 2014.....	57
Tabel 12.	Relawan Bidang Fotografi Tahun 2014.....	59
Tabel 13.	Relawan Bidang Web Design and Development Tahun 2014.....	60
Tabel 14.	Relawan Bidang Animasi Tahun 2014 .....	60
Tabel 15.	Relawan Bidang Digital Audio Tahun 2014.....	61
Tabel 16.	Relawan Bidang Game Interaktif Tahun 2014.....	62
Tabel 17.	Data Industri Tahun 2014.....	63

Tabel 18. Relawan Bidang Videografi dan Film Tahun 2015.....	65
Tabel 19. Relawan Bidang Fotografi Tahun 2015 .....	67
Tabel 20. Relawan Bidang Web Design and Development Tahun 2015.....	68
Tabel 21. Relawan Bidang Animasi Tahun 2015 .....	69
Tabel 22. Relawan Bidang Digital Audio Tahun 2015 .....	71
Tabel 23. Relawan Bidang Game Interaktif Tahun 2015.....	71
Tabel 24. Data Industri Tahun 2015.....	73
Tabel 26. Relawan Bidang Fotografi Tahun 2016.....	77
Tabel 27. Relawan Bidang Web Design and Development Tahun 2016.....	78
Tabel 28. Relawan Bidang Animasi Tahun 2016 .....	79
Tabel 29. Relawan Bidang Digital Audio Tahun 2016.....	81
Tabel 30. Relawan Bidang Game Interaktif Tahun 2016.....	81
Tabel 31. Relawan Bidang Ilustrasi Tahun 2016.....	82
Tabel 32. Data Industri Tahun 2016.....	83
Tabel 33. Hambatan Dalam Pengembangan Industri.....	92
Tabel 34. Analytical Hierarchy Process Pengembangan Industri .....	93
Tabel 35. Program Penumbuhan Industri Telematika di Malang Raya Dalam Pembinaan JITC Malang Berpotensi Wirausaha Mandiri.....	96
Tabel 36. Persepsi Pelaku Industri Terhadap Sinergi, Sinkronisasi dan Koordinasi Program Diantara Dinas Terkait Dalam Penguatan IMKM Telematika .....	98
Tabel 37. Persepsi Pelaku Industri Terhadap Pengorganisasian Kegiatan Diantara Dinas Terkait Dalam Program Penguatan IMKM .....	99
Tabel 38. Persepsi Pelaku Industri Terhadap Pelaksanaan Program Penguatan IMKM.....	101

Tabel 39. Persepsi Responden Terhadap Peran Instansi Dalam Memperkuat IMKM .....	102
Tabel 40. Evaluasi Pelaku Industri Terhadap Penguatan IMKM .....	104
Tabel 41. Matriks SWOT .....	107
Tabel 42. Indikator Faktor-faktor Internal dalam Pengembangan UPT Teknologi Informasi.....	110
Tabel 43. Indikator Faktor-faktor Eksternal dalam Pengembangan UPT Teknologi Informasi.....	114
Tabel 44. Contoh Tabel Perhitungan Analisis SWOT .....	117
Tabel 45. Rancangan Strategis UPT TI dalam Penguatan Basis Komunitas Industri.....	146
Tabel 46. Industri dan estimasi total penerimaan per tahun.....	159
Tabel 47. Estimasi Biaya Investasi UPT Teknologi Informasi.....	159
Tabel 48. Estimasi Biaya Kegiatan pelatihan.....	160
Tabel 49. Penggunaan tenaga kerja .....	161
Tabel 50. Estimasi Biaya operasional selama empat tahun .....	161
Tabel 51. Kriteria Kelayakan Finansial UPT .....	162





## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1	Quadruple Helix Model.....	31
Gambar 3.	Diagram Proses Analisa .....	42
Gambar 4	Diagram Proses Analisa .....	43
Gambar 17.	Rating Kekuatan .....	110
Gambar 18.	Rating Kelemahan .....	111
Gambar 19.	Rating Peluang .....	115
Gambar 20.	Rating Ancaman.....	115
Gambar 21.	Rating Ancaman.....	115
Gambar 22.	Matriks Kuadran SWOT .....	117
Gambar 23.	Implementasi Model Penumbuhan dan Penguatan Industri Telematika JITC Malang .....	133
Gambar 24.	Skema Pola Kerja JITC Malang Penyangga UPT TI .....	140
Gambar:	Pola Inovasi Teknologi.....	192





# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Pemberian otonomi merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah diperlukan satuan kerja dan seperangkat aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu satuan kerja pemerintah daerah adalah dinas perindustrian dan perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Pergub Nomor 96 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Subbag dan Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Pergub No. 133 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Disperindag Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang industri dan perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran yang strategis yaitu pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan sebagaimana tercermin dalam PERDA Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah bab 20 pasal 37 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang industri dan perdagangan. Dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatkan daya saing industri manufaktur di Jawa Timur melalui:
  - a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
  - b. Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumber Daya Alam;
  - c. Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri;
  - d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
  - e. Peningkatan Standarisasi Industri;
  - f. Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam).
3. Meningkatkan ekspor non-migas dan pengendalian impor;

4. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dalam kaitannya dengan menciptakan stabilitas harga pokok dan mengendalikan inflasi, memberdayakan komoditi agro melalui pelaksanaan pasar lelang komoditi agro.
5. Meningkatkan perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan tertib niaga dan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar ilegal, sertifikasi mutu barang.

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, terdapat 15 UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau Surabaya;
2. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau Jember;
3. UPT Kemetrologian Surabaya ;
4. UPT Kemetrologian Malang ;
5. UPT Kemetrologian Jember ;
6. UPT Kemetrologian Kediri;
7. UPT Kemetrologian Madiun ;
8. UPT Kemetrologian Bojonegoro ;
9. UPT Kemetrologian Pamekasan ;
10. UPT Industri Logam dan Perakayasaan Sidoarjo ;
11. UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Surabaya ;
12. UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan ;
13. UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan ;
14. UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya;
15. UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor Surabaya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur selama 2 tahun berjalan ini, telah merencanakan dan dengan serius melakukan berbagai kegiatan untuk memfasilitasi percepatan pertumbuhan seluruh sektor industri, serta mendukung perkembangannya dalam rangka peningkatan produksi dan distribusi hasil-hasilnya. Disinilah Bidang IATT Disperindag Provinsi Jawa Timur justru memiliki peran sentral untuk mewujudkan

daya dukung yang nyata, karena secara definitif mengemban tugas dan tanggungjawab untuk memajukan industri elektronika dan telematika. Kondisi ini ditandai dengan kesungguhan untuk mewujudkan masyarakat industri sebagaimana menjadi visi yang ada di dalam Surat Keputusan Presiden R.I Nomor: 30 Tahun 1997 yang intinya memberikan arah secara tepat pengembangan sektor industri dengan menunjuk Tim Koordinasi Bidang Telematika Indonesia di bawah Menko Ekuin Bidang Produksi dan Distribusi (Menko Prodis), untuk merumuskan kebijakan pemerintah menggiatkan pemanfaatan dan pengendalian penyelenggaraan telematika di Indonesia.

Mengkaji lebih mendalam tentang kebijakan untuk menumbuhkembangkan masyarakat industri kreatif berbasis elektronika dan telematika tersebut, maka Menko Prodis memberikan arahan yang lebih aplikabel dengan merumuskan kembali konsep dasar (paradigma) pengembangan Industri Elektronika dan Telematika yang terdiri atas 3 (tiga bagian). Pertama: Industri Telematika-Elektronika Pengkayaan Kreatif Semikonduktor yang meliputi pemanfaatan komponen dan modul, antara lain: IC, crystal resonator, power supply, floppy disk, kabel printer, stabilizer, switching dan kamera digital, rekayasa lampu, control electrical and mechanical system, audio-visual televisi, dan elektronika lainnya. Adapun target investasi sebesar US \$ 8 milyar mulai dengan tahun 2003, sedangkantarget ekspor komoditi elektronika pada tahun 2006 sebesar US \$ 40 milyar. Kedua: Industri Telematika-Informatika Perangkat Keras yang berhubungan dengan kreativitas produksi peralatan untuk pengolah data seperti perakitan komputer, monitor, dan peripheral. Ketiga: Industri Telematika-Informatika Perangkat Lunak yang berhubungan dengan kreativitas produksi melalui kemampuan untuk mengolah ide, konsep dan memadukan berbagai program pengarah (*driver*) antara lain industri film, video, disain jaringan informasi (e-commerce, web design and LAN),serta disain (grafis dan animasi). Adapun garis besar kebijakan pembangunan Industri kreatif berbasis Telematika mempunyai 3 tujuan.

1. Mendukung kegiatan Telematika nasional dan sekaligus memanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan industri dalam negeri.
2. Mendukung perwujudan kegiatan ekonomi yang lebih efisien.
3. Menjadi wahana untuk meningkatkan kegiatan investasi, baik di bidang Industri Telematika maupun di bidang kegiatan ekonomi lainnya.

Melihat Pertumbuhan Jawa Timur 7,24 persen (diatas pertumbuhan nasional yang hanya 6,4 persen), pertumbuhan industri 6,27 persen dan perdagangan 10,11 persen, kontribusi sector industri dan perdagangan terhadap PDRB Jawa Timur sebesar 51.08 persen, menjadi modal bagi industri ICT untuk dapat berkembang dengan pesat. Hasil penelitian juga semakin menguatkan harapan tersebut karena faktanya ICT menguasai 12,57% dari penjualan sector industri kreatif di Jawa Timur.

Industri kreatif merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Ada 14 subsektor industri kreatif yaitu : periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video/ film/ fotografi, permainan interkatif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan (Disperindag, 2008). Pengembangan industri kreatif dibutuhkan dukungan kerja sama antara cendekiawan (intellectuals), bisnis (business) dan pemerintah (government), yang disebut sebagai sistem Triple Helix, yang merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan. Suatu premis bahwa sirkulasi Triple Helix merupakan suatu bidang yang dapat menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kreativitas, ide-ide dan keterampilan (Etzkowitz, 2008).

Dengan keberadaan Balai Diklat Industri (BDI) Regional V, JITC (Jawa Timur Industri Creative), RICE (Regional ICT Center of Excellent), Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 853 dan Perguruan Tinggi sebanyak 70 yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur serta potensi pasar yang cukup luas, maka diharapkan industri kreatif yang berbasis ICT yang jumlahnya mencapai 423 unit usaha dapat berkembang dan dapat menjadikan Jawa Timur sebagai pusat pengembangan industri kreatif berbasis telematika terkemuka, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Jawa Timur yang semakin makmur.

Kondisi perkembangan industri yang demikian dan guna mendukung *Grand Strategy* Jawa Timur menuju pada terwujudnya sebuah kawasan sebagai: “***pusat pengembangan industri kreatif elektronika dan telematika terkemuka, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Jawa Timur yang semakin makmur***” diperlukan unit pelaksana teknis yang khusus fokus pada pengembangan industri kreatif berbasis ICT. Kondisi ini didukung oleh fakta bahwa potensi pertumbuhan industri elektronika dan telematika di Jawa

Timur masih sangat tinggi dan diperkirakan akan terus berkembang dalam jangka waktu lama. Kebutuhan masyarakat akan industri telematika dan turunannya semakin meningkat sejalan dengan perkembangan investasi, teknologi dan manajemen. Semua hal tersebut diperlukan sebagai sebuah kebutuhan utama, bukan lagi hanya sekedar gaya hidup. Hal ini ditunjang pula dengan populasi penduduk Jawa Timur yang semakin banyak, sehingga membentuk pasar yang potensial bagi produk elektronika maupun telematika.

Namun untuk mewujudkan *grand strategy* tersebut, pengembangan industri khususnya industri kreatif berbasis ICT dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain: **1) Terbatasnya infrastruktur dan kemampuan manajemen IMKM** yang ditandai dengan kondisi: a) Pengembangan sumberdaya manusia masih dilakukan secara konvensional dan bergerak dalam lingkungan yang terbatas; b) Berlimpahnya potensi sumberdaya manusia yang belum memiliki standar prestasi bernilai ekonomi (bisnis) dan cenderung masih ditentukan pada tingkatan askriptif (di lingkup ikatan pertemanan); c) Dukungan perangkat teknologi elektronika dan telematika yang masih terbatas; d) Pola penggunaan perangkat teknologi yang belum efisien dan efektif dalam mendukung kegiatan industri; e) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya manusia masih belum terdistribusi secara merata dan cenderung berakivitas sendiri-sendiri dan f) Sumberdaya manusia potensial masih belum mandiri dan memerlukan dukungan untuk melembagakan aktivitas bisnisnya dalam bentuk asosiasi pelaku industri.; **2) Kelembagaan yang belum terbentuk; 3) Komunitas yang belum terkoordinir dengan optimal; 4) Model jaringan kerja yang belum tersusun dengan baik; 5) Terbatasnya keterlibatan stakeholders.** Dilain pihak upaya yang dilakukan selama ini masih bersifat mobilisasi sumberdaya insani, sehingga dampaknya berkecenderungan tertuju peningkatan keahlian di bidang produksi, sedangkan tujuan mulia dari program peningkatan industri kreatif berbasis ICT adalah menuju masyarakat mandiri, baik dalam pengertian politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berwawasan nilai-nilai regional belum tercapai.

Sejauh ini seluruh potensi yang ada masih belum mampu memberikan dukungan yang optimal kepada para pelaku industri, khususnya pada lingkup industri kecil yang beraktivitas di daerah-daerah dan pada umumnya masih bergerak di sektor informal, sehingga termarginalkan secara sosial dan ekonomi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu dibuat kajian perencanaan dan fasilitas UPT teknologi informasi.

## **B. Tujuan**

Tujuan Kajian Strategi Penguatan Kelembagaan Komunitas Kreatif Telematika adalah untuk:

1. Mengetahui potensi dan kendala Industri Kreatif Berbasis Komunitas Dalam Wadah JITC sebagai embrio dirintisnya pendirian kelembagaan UPT Teknologi Informasi
2. Mengetahui kelayakan dirintisnya pendirian kelembagaan UPT Teknologi Informasi Berbasis Komunitas dalam Wadah JITC sebagai penyangga (buffer)nya.
3. Menciptakan model pengembangan UPT Teknologi Informasi berbasis komunitas dalam wadah JITC sebagai penyangga (buffer)nya
4. Merekomendasikan strategi pengembangan UPT Teknologi Informasi berbasis komunitas dalam wadah JITC sebagai penyangga (buffer)nya pada masa yang akan datang.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa timur juncto Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan undang-undang tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); yang diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).
  13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

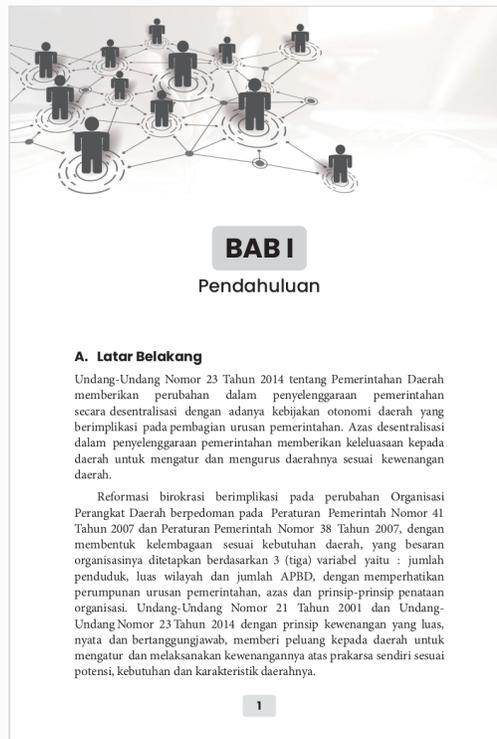


## Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Dr. Fajar Supanto, Se, M.si  
Assignment title: ARTICLES  
Submission title: Strategi Penguatan Kelembagaan komunitas Kreatif Telemat...  
File name: Strategi\_Penguatan\_Kelembagaan.pdf  
File size: 5.34M  
Page count: 198  
Word count: 42,968  
Character count: 278,454  
Submission date: 31-Mar-2023 01:07PM (UTC+0700)  
Submission ID: 2051800050



# Strategi Penguatan Kelembagaan komunitas Kreatif Telematika

*by* Dr. Fajar Supanto, Se, M.si

---

**Submission date:** 31-Mar-2023 01:07PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2051800050

**File name:** Strategi\_Penguatan\_Kelembagaan.pdf (5.34M)

**Word count:** 42968

**Character count:** 278454

# Strategi Penguatan Kelembagaan komunitas Kreatif Telematika

---

## ORIGINALITY REPORT

---

15%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

1%

★ [www.kalteng.go.id](http://www.kalteng.go.id)

Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off